

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi (pelayanan kefarmasian). Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien (*pharmaceutical care*) yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Ma'sum *et al.*, 2016).

Apoteker yang melaksanakan praktik kefarmasian di apotek selayaknya berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut menetapkan keharusan adanya pelayanan farmasi klinik di apotek. Kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotek contohnya seperti dispensing dan pelayanan informasi obat (PIO).

Dalam penelitian Diana *et al.* (2019) dispensing yang dilakukan oleh apoteker dilaporkan rata-rata hanya sebesar 36,9%, sisanya yaitu 36,1% dilakukan oleh asisten apoteker, 21,2% oleh asisten apoteker dan apoteker, dan 5,8% tidak dilakukan. Pelayanan tersebut meliputi penyiapan obat, perhitungan jumlah obat sesuai resep, pengambilan obat sesuai kebutuhan, peracikan obat (bila perlu), pemberian etiket pada obat, memasukkan obat ke wadah, pemeriksaan ulang obat, pembuatan salinan resep, dan penyimpanan resep. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada obat-obat konvensional dimana keberadaannya dan penggunaannya lebih banyak dibandingkan dengan obat herbal, sehingga pelayanan kefarmasian terkait

obat herbal masih sangat terbatas. Seperti pada penelitian Gelayee *et al.* (2017), sebesar 55,3% apoteker tidak pernah melakukan dispensing pada obat herbal dikarenakan sebagian besar responden tidak menerima pelatihan tambahan dan terbatasnya akses terkait informasi obat-obat herbal. Pada penelitian survei Puspitasari *et al.* (2019) apoteker yang melakukan dispensing dan pelayanan informasi obat yang meliputi penyiapan obat dan jumlah obat sesuai yang diminta oleh pasien, pemberian etiket pada obat, pengecekan obat (nama, kadaluarsa, fisik obat), pemberian informasi obat (manfaat, cara penggunaan, penyimpanan obat) khususnya mengenai obat herbal memberikan hasil yang cukup tinggi, yang berarti apoteker melakukan pelayanan kefarmasian tersebut. Namun apoteker yang memberikan informasi obat mengenai efek samping dan interaksi obat sangat sedikit, sehingga perlu dilakukan penelitian alasan apoteker kurang dalam memberikan informasi obat herbal.

Selain dispensing, pelayanan kefarmasian yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu pelayanan informasi obat (PIO). Dalam penelitian Diana *et al.* (2019), dilaporkan pelayanan informasi obat di apotek sebesar 62,1% tidak dilakukan, hanya 27,5% dilakukan oleh apoteker di Kota Palu. Pelayanan tersebut meliputi menjawab pertanyaan, membuat dan menyebarkan bulletin/brosur/leaflet, melakukan penyuluhan ke masyarakat, memberi informasi dan edukasi ke pasien, memberi pengetahuan dan keterampilan ke mahasiswa, melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum, dan melakukan program jaminan mutu. Penelitian tersebut dilakukan pada obat modern, sedangkan pada obat herbal, penelitian mengenai pelayanan informasi obat masih sangat kurang sehingga data mengenai pelayanan informasi obat tentang obat herbal sangat terbatas.

Menurut penelitian Andriati dan Wahjudi (2016), sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih mengkonsumsi obat herbal baik untuk pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan dilaporkan lebih dari 50%. Hal ini juga terlihat dari data penelitian di Kabupaten Tulungagung, penggunaan obat herbal di masyarakat dan permintaan obat herbal cukup tinggi sehingga sebagian besar apotek di wilayah tersebut banyak yang menyediakan obat herbal, seperti di penelitian pendahuluan Puspitasari *et al.* (2019), dari beberapa apotek yang sudah di survei terdapat 98,6% dari 73 apotek menyediakan obat herbal.

Meskipun survei di apotek menunjukkan bahwa sebagian besar apotek di Kabupaten Tulungagung telah menyediakan produk obat herbal, tetapi fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa permintaan obat herbal ilegal juga tinggi (Yohanes, 2019). Pasien sering mencari saran dan informasi tentang obat-obatan, termasuk obat-obatan herbal, kepada apoteker (Oshikoya *et al.*, 2013). Apoteker sebagai sumber informasi bagi masyarakat memiliki peran memberikan informasi berdasarkan bukti dan membantu pasien untuk membuat pilihan yang aman tentang bahan alam (Al-Arifi, 2013). Sebagai tenaga kesehatan, apoteker memiliki peran penting dalam mengevaluasi keamanan, khasiat, dan efektivitas produk herbal dan suplemen makanan sehingga apoteker diharapkan dapat membimbing pasien mengenai penggunaan obat herbal secara benar dan tepat (Lin *et al.*, 2008). Selain itu, apoteker juga berperan penting dalam mengedukasi pasien dan masyarakat mengenai obat khususnya obat herbal. Apoteker tidak hanya terbatas pada pendistribusian atau jual beli obat, melainkan juga harus menjaga keaslian obat yang mereka sediakan.

Berdasarkan data-data dan pernyataan yang telah disebutkan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi apoteker dalam melaksanakan dispensing dan pelayanan informasi obat herbal, khususnya di Wilayah Tulungagung.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Apoteker dalam melakukan dispensing dan pelayanan informasi obat herbal di apotek Wilayah Tulungagung ?
- b. Bagaimanakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi apoteker dalam melakukan dispensing dan pelayanan informasi obat herbal ?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Apoteker dalam melakukan dispensing dan pelayanan informasi obat herbal dan mengetahui bagaimanakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi Apoteker dalam melakukan dispensing dan pelayanan informasi obat herbal di apotek Wilayah Tulungagung.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data ilmiah atau referensi untuk penelitian lain dan menjadi gambaran untuk para ahli profesi Apoteker dalam melakukan dispensing dan pelayanan pelayanan informasi obat herbal di Apotek sehingga dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi dalam hal memperbaiki atau meningkatkan pelayanan kefarmasian di Apotek.